

PERANG KOREA DAN DIPLOMASI INDONESIA DI PBB (1950-1955)

KOREAN WAR AND INDONESIAN DIPLOMACY AT THE UNITED NATIONS (1950-1955)

Muhamad Aditya Setiawan¹

¹ Departemen Sejarah, Universitas Gadjah Mada
m.aditya.s@mail.ugm.ac.id

Abstrak

Artikel ini akan mendiskusikan tentang dinamika yang terjadi selama Perang Korea berlangsung sejak 1950 hingga 1953 dan diplomasi multilateral Indonesia di PBB dalam rangka menyelesaikan konflik tersebut secara damai demi terciptanya perdamaian dunia. Perang Korea merupakan salah satu perang besar yang menjadi bagian dari dinamika Perang Dingin. Selama ini telah banyak penelitian yang mengkaji mengenai Perang Korea. Akan tetapi, penelitian yang mengkaji diplomasi Indonesia dalam usaha menciptakan perdamaian diantara pihak yang berkonflik dalam Perang Korea masih belum menjadi perhatian serius pada sejarawan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa terjadinya Perang Korea disebabkan oleh adanya perbedaan ideologi antara Korea Selatan dan Korea Utara, serta keinginan untuk melakukan reunifikasi secara paksa melalui peperangan. Selain itu, penelitian ini mengungkapkan bahwa Indonesia sebagai negara yang baru lepas dari kekuasaan kolonial turut terlibat aktif dalam mencari penyelesaian secara damai di Semenanjung Korea melalui diplomasi multilateral di PBB.

Kata Kunci: Perang Korea, Perang Dingin, dan Diplomasi Indonesia.

Abstract

This paper will discuss the dynamics that occurred during the Korean War from 1950 to 1953 and Indonesia's multilateral diplomacy at the United Nations to resolve the conflict peacefully in order to create world peace. The Korean War was one of the major wars that became part of the dynamics of the Cold War. So far, there have been many studies examining the Korean War. However, research that examines Indonesian diplomacy to create peace between the conflicting parties in the Korean War has not received serious attention from historians. From the results of the study, it was found that the occurrence of the Korean War was caused by ideological differences between South Korea and North Korea, as well as the desire to carry out forced reunification through war. In addition, this research reveals that Indonesia as a country that had just been freed from colonial rule was actively involved in seeking a peaceful settlement on the Korean Peninsula through multilateral diplomacy at the United Nations.

Keywords: Korean War, Cold War, and Indonesian Diplomacy.

Latar Belakang

Konflik di Semenanjung Korea atau yang sering dikenal dengan Perang Korea merupakan sebuah konflik saudara antara Korea Utara dan Korea Selatan. Konflik ini terjadi pada pertengahan tahun 1950 tepatnya dimulai pada 25 Juli hingga berakhir tiga

tahun kemudian. Perang ini terjadi lantaran adanya perbedaan ideologi yang dianut oleh dua negara Korea yang saling mengklaim sebagai penguasa tunggal di seluruh semenanjung. Korea Utara yang berhaluan komunis mendapat dukungan dari Cina dan Soviet, sementara Korea Selatan mendapat dukungan penuh dari Amerika Serikat (Wicaksono, 2020: 20). Terjadinya perang ini telah mengakibatkan ± 2,5 juta orang meninggal yang menjadikan konflik tersebut sebagai salah satu perang besar pasca berakhirnya Perang Dunia II. Menariknya perang ini terjadi justru setelah terbentuknya organisasi internasional yang bertugas menjaga perdamaian dunia.

Walaupun konflik yang terjadi di Korea tampaknya hanya melibatkan dua saudara yang saling bertikai. Akan tetapi, bila ditinjau dari sudut pandang geopolitik dunia Perang Korea tidak hanya sekedar konflik saudara yang saling berebut hak atas penguasaan seluruh daratan semenanjung. Perang Korea sejatinya merupakan perpanjangan langsung dari perseteruan dua ideologi yang melibatkan Blok Barat dan Blok Timur (Utama, 2017:72) Apalagi persaingan kedua blok tersebut telah di mulai sejak 1947 yang dikenal sebagai Perang Dingin. Alhasil konflik di Semenanjung Korea pada akhirnya merupakan bagian dari bentuk nyata Perang Dingin antara Amerika dan Soviet di kawasan Asia Pasifik.

Bila dibandingkan dengan perang saudara di Cina selama 1945-1949 yang dimenangkan oleh pasukan komunis pimpinan Mao. Dalam perang tersebut AS tidak melibatkan diri dan membiarkan pasukan Kuomintang mengungsi ke Pulau Fomosa. Akan tetapi, hal berbeda terjadi di Korea. Ketika Korea Utara melakukan invasi ke Selatan Amerika Serikat dengan segera memberikan tanggapan dengan terlibat langsung ke dalam perang tersebut (Fautua, 1997:100). Tujuannya tentu untuk mempertahankan Korea Selatan agar tidak jatuh ke tangan komunis. Hal ini tentu sejalan dengan politik pembendungan AS untuk menghambat penyebaran komunis. Saat Korea Utara hampir menuai kekalahan Cina dan Uni Soviet pada akhirnya melibatkan diri untuk mempertahankan pengaruh komunis di wilayah itu (Yasuda, 1998:75-76).

Meletusnya Perang Korea pada 25 Juni 1950 menyorot perhatian dunia internasional. Banyak negara khawatir perang yang tidak dapat dilepaskan akibat adanya Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur akan menyeret dunia pada perang besar baru yang lebih besar. Oleh karena itu, pembahasan mengenai konflik di Korea turut

menjadi perbincangan di forum internasional seperti PBB. Sejak perang berkecamuk PBB bahkan telah bertindak dengan mengeluarkan resolusi untuk terlibat dalam perang tersebut (Utama, 2017:73). Selama perang berlangsung usaha-usaha untuk menghentikan perang dan menciptakan perdamaian di Korea terus berlangsung. Indonesia sebagai anggota baru PBB juga turut terlibat dalam upaya penyelesaian konflik di Korea melalui perundingan. Melalui para perwakilannya di PBB Indonesia terus terlibat dalam setiap agenda pembahasan mengenai konflik di Korea melalui perundingan.

Adapun permasalahan yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana keterlibatan Indonesia dalam upaya penyelesaian konflik di Korea melalui diplomasi di PBB demi terciptanya perdamaian dunia di kawasan tersebut. Pertanyaan penelitian ini berangkat dari masih minimnya kajian terhadap sejarah diplomasi Indonesia terutama yang berkaitan dengan usaha penyelesaian konflik di Korea. Selama ini, penelitian yang ada hanya berfokus pada terjadinya perang yang diakibatkan adanya dinamika perang dingin. Sementara itu, penelitian yang mengkaji mengenai peran Indonesia belum menjadi perhatian.

Beberapa kajian mengenai sejarah Korea dan dinamika perang dingin diantaranya adalah karya Michael J. Seth yang berjudul “A Concise History of Premodern Korea; From Antiquity through the Nineteenth Century” dan “A Concise *History of Modern Korea: From the Late Nineteenth Century to the Present*” yang mengkaji secara detail mengenai sejarah panjang Korea sebagai bangsa (Seth, 2010:12). Di dalam karya tersebut Seth juga menguraikan terjadinya Perang Korea. Selain dua karya tersebut juga terdapat kajian lain dari Micahel Wicaksono yang berjudul “Perang Korea: Pertikaian Panjang Dua Saudara” yang menguraikan proses terjadinya perang sejak pendudukan Sekutu hingga rencana reunifikasi (Wicaksono, 2020: 10). Selain ketiga karya tersebut juga terdapat karya dari Jongso Lee berjudul “The Partition of Korea After World War II: A global History” yang mengulas mengenai dinamika Korea pasca berakhirnya Perang Dunia II yang terpecah menjadi dua negara yang berbeda (Lee, 2006: 2). Kajian lain yang berbeda datang dari Callum McDonald “The Democratic People's Republic of Korea: an Historical Survey” yang menjelaskan mengenai sejarah Korea Utara di bawah pimpinan rezim Kim Il Sung (McDonald, 1996: 5).

Dari beberapa kajian yang telah disebutkan belum ditemukan penelitian yang mengkaji peran Indonesia dalam upaya penyelesaian konflik di Korea melalui diplomasi di PBB. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi menarik untuk dilakukan. Sementara itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian di Korea melalui diplomasi, sehingga dapat diketahui oleh para pembaca dan masyarakat umum secara luas.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode sejarah yakni dimulai dengan pengumpulan sumber, kemudian verifikasi data dan fakta yang ditemukan, interpretasi dan penulisan (Kuntowijoyo, 2013:69) Sumber-sumber penelitian ini didapatkan dengan melakukan studi pustaka baik berupa arsip, surat kabar, buku dan artikel jurnal. Studi Pustaka yang dilakukan yakni dengan mengunjungi Perpustakaan Pusat UGM dan Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya UGM. Selain itu, studi Pustaka dilakukan dengan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia secara digital melalui UN Digital Archives *delpher*, *trouve*, dan *jstor*. Setelah menemukan sumber-sumber yang relevan, langkah selanjutnya yakni melakukan verifikasi sumber. Verifikasi ini sangat penting dilakukan dalam penelitian sejarah, agar sumber-sumber yang memuat data dan fakta historis dapat diuji kebenarannya. Tahap selanjutnya adalah melakukan interpretasi terhadap sumber-sumber yang telah ditemukan sebelumnya. Pada tahap inilah fakta-fakta historis yang ada ditafsirkan untuk kemudian dilakukan penulisan menjadi sebuah cerita yang utuh dan kronologis.

Hasil dan Pembahasan

1. Awal Mula Terjadinya Konflik

Korea merupakan nama sebuah daratan semenanjung yang berada di antara Cina dan Jepang. Di sebelah timurnya berbatasan dengan Laut Jepang, sementara di sebelah baratnya berbatasan dengan Laut Kuning. Adapun di selatannya berbatasan dengan Laut Cina Timur dan di utara berbatasan dengan Sungai Yalu. Di masa silam Semenanjung Korea dikuasai oleh berbagai kerajaan yang membentuk dinasti yang silih berganti. Di mulai dari era tiga kerajaan yakni Silla, Baekje, dan Gogoryeo yang bertahan sampai abad

keenam (Seth, 2006:30). Pasca penyatuan kerajaan oleh Silla di abad ketujuh Masehi, Korea menjadi sebuah negara setelah keruntuhan Dinasti Silla, Korea memasuki era baru yang dipimpin oleh raja-raja Dinasti Goryeo sampai abad 14 tepatnya tahun 1392 (Seth, 2006: 47-50, 83, 123-125). Dinasti Goryeo runtuh setelah kudeta yang dilakukan oleh salah seorang panglima perangnya yang bernama Yi Seong Gye. Yi kemudian mendirikan dinasti baru yang diberi nama Joseon. Dinasti Joseon memerintah semenanjung Korea hingga aneksasi Jepang di tahun 1910 (Kleiner, 2001:12,24).

Pasca dianeksasi oleh Jepang, Dinasti Joseon yang memerintah Korea dengan mendirikan kekaisaran di tahun 1897 akhirnya dibubarkan. Pembubaran ini menandai awal dari kolonisasi Jepang atas wilayah semenanjung tersebut. Korea secara keseluruhan dikolonisasi oleh Jepang selama 35 tahun hingga berakhirnya Perang Duni II di pertengahan 1945 Kleiner, 2001: 29-30, 41-43).

Lantaran menelan kekalahan dalam Perang Pasifik, sesuai perjanjian Jepang harus menyerahkan seluruh wilayah koloninya kepada Sekutu sebagai pihak yang memenangkan perang. Penyerahan ini termasuk wilayah Semenanjung Korea yang telah dikuasai selama 35 tahun sejak keruntuhan Dinasti Joseon. Alhasil penyerahan ini membuat nasib wilayah semenanjung tersebut berada di tangan pihak Sekutu yang di masa selanjutnya justru menimbulkan perpecahan hingga sekarang Wicaksono, 2020:45-47).

Sebagai pihak yang memenangkan perang atas Jerman, Jepang, dan Italia, Sekutu yang terdiri dari Amerika Serikat dan Uni Soviet membuat kesepakatan dalam mengurus wilayah bekas koloni Blok Sentral. Adapun kesepakatan ini tercantum dalam Perjanjian Potsdam yang disepakati kedua belah pihak. Oleh karena itu, mengacu pada perjanjian tersebut Amerika Serikat dan Soviet menyepakati pembagian Semenanjung Korea menjadi dua bagian. Adapun tujuan pembagian wilayah tersebut dimaksudkan agar proses pengaturan lebih mudah dan efisien, terutama dalam pengembalian tentara Jepang ke negara asalnya Wicaksono, 2020:45-47).

Setelah berhasil mengalahkan Jepang baik Uni Soviet maupun Amerika Serikat segera menduduki Semenanjung Korea. Sesuai dengan perjanjian awal, Soviet menduduki sisi bagian utara dan Amerika Serikat menduduki sisi selatan. Setelah keduanya menduduki semenanjung, baik Soviet dan Amerika kemudian berusaha

menegakkan kekuasaannya atas wilayah pendudukan masing-masing. Di Korea Utara Soviet mengangkat seorang pemimpin muda bernama Kim Il Sung untuk memimpin pemerintahan komunis. Sementara di Korea Selatan Amerika Serikat memilih Sygman Rhee sebagai pemimpin dengan haluan demokrasi liberal. Perbedaan ideologi dalam membentuk pemerintahan di Korea inilah yang kemudian menimbulkan permusuhan diantara keduanya (Wicaksono, 2020:48).

Pemerintahan sementara di kedua Korea yang awalnya hanya ditujukan untuk kepentingan Sekutu dengan batas pemisah 38° LU ternyata semakin hari berubah menjadi batas negara yang memisahkan keduanya. Pemisahan dua Korea tersebut semakin nyata dengan adanya pengumuman sepihak pada 1948 oleh Korea Selatan untuk mengadakan pemilu dalam rangka memilih anggota parlemen. Pemilihan pun resmi digelar dan menghasilkan anggota parlemen Korea pada Mei 1948. Setelah bersidang selama dua bulan parlemen Korea Selatan secara resmi memilih Rhee sebagai presiden dan memproklamasikan berdirinya Republik Korea pada 15 Agustus 1948 (Seth, 2010:95). Melihat tindakan sepihak Korea Selatan yang mengadakan pemilu, Korea Utara sempat mengecam tindakan tersebut dan mengabaikan semua upaya perundingan damai. Pada akhirnya pihak Soviet mengadakan pemilu untuk membentuk parlemen di Korea Utara. Setelah parlemen terbentuk, sebuah negara komunis dengan nama Republik Demokratik Rakyat Korea resmi dideklarasikan dengan Kim Il Sung sebagai pemimpinnya (Seth, 2010:96). Terbentuknya dua pemerintahan di Korea dengan ideologi yang berbeda tersebut membuat permusuhan diantara keduanya semakin tajam.

Walaupun kedua negara dengan ras yang sama tersebut saling berseteru upaya reunifikasi dengan cara damai terus diupayakan. Akan tetapi, usaha tersebut tidak mencapai titik temu diantara keduanya. Selain itu, perbedaan keduanya juga semakin melebar. Alhasil konflik yang telah tercipta sebagai akibat pemecahan wilayah tersebut semakin jelas adanya.

2. Meletusnya Perang Korea

Pada 1949 Partai Komunis China pimpinan Mao Zedong berhasil mengalahkan kubu nasionalis di daratan Tiongkok dan berhasil menyatukan negara itu. Keberhasilan ini memberikan inspirasi bagi Kim Il Sung untuk melakukan hal serupa untuk melakukan

reunifikasi di Semenanjung Korea melalui jalan kekerasan. Keinginan Kim untuk melakukan reunifikasi melalui jalan perang juga didorong oleh pemerintahan AS dan Syngman Rhee yang kacau di Korea Selatan. Di tambah dukungan dari tokoh komunis bernama Park Heon-yeong yang berada di Selatan Wicaksono, 2020:72).

Sementara itu dalam mempersiapkan diri untuk melakukan invasi ke Korea Selatan dalam misi reunifikasi paksa Kim berupaya meningkatkan kemampuan pasukan Korea Utara, sehingga lebih disiplin dan terampil. Tidak sampai di situ Kim juga meminta bantuan Soviet untuk melatih dan mengirimkan alutsista berat seperti kendaraan lapis baja untuk mendukung pasukan Korea Utara. Adanya peningkatan kemampuan pasukan dan tambahan alutsista modern ini Korea Utara telah siap untuk melakukan misi reunifikasi (Wicaksono, 2020:85).

Namun untuk melakukan rencana reunifikasi Korea melalui jalan peperangan Kim Il Sung tidak bisa memutuskan sendiri lantaran pemerintahannya berada dalam pengaruh dan kendali Soviet. Selain itu, berbeda dengan Cina, Korea Selatan mendapatkan dukungan dari Amerika Serikat, sehingga melakukan penyerangan ke Selatan bukanlah perkara mudah. Oleh karena itu, Kim perlu meminta persetujuan dari Stalin untuk melancarkan serangan kilat ke Selatan. Selain meminta dukungan ke Soviet Kim juga perlu meminta restu ke negara tetangganya yaitu Cina di bawah pimpinan Mao. Hal ini penting bagi Kim karena dukungan pendanaan, senjata, dan pasukan dari kedua negara komunis tersebut sangat dibutuhkan (Sandler, 1999:47).

Oleh karenanya beberapa bulan menjelang invasi besar-besaran Korea Utara ke Selatan, Kim berupaya melobi Stalin dan Mao untuk memberinya persetujuan. Kim terlebih dahulu pergi ke Moskwa pada Maret 1950 untuk bertemu Stalin. Setelah bernegosiasi ia berhasil meyakinkan pemimpin Soviet itu untuk menyetujui invasi ke Selatan. Dua bulan kemudian tepatnya Mei 1950 Kim berjunjung ke Beijing untuk meminta bantuan Mao apabila invasinya mengalami kegagalan (Wicaksono, 2020:88-89).

Setelah mendapatkan persetujuan dari kedua negara komunis tersebut Kim segera mempersiapkan pasukannya untuk memulai peperangan. Setelah persiapan matang dilakukan Kim segera memulai invasinya ke Selatan pada 25 Juni 1950 (*Yorkshire Evening Post*, 1950) dengan menerjunkan pasukan yang berjumlah 10 divisi baik darat, laut, dan udara. Setelah resmi dimulainya perang pasukan Korea Utara dengan segera

membangiri Selatan melalui 4 jalur yang mengarah ke ibukota Seoul. Pasukan Utara dengan cepat menguasai kota-kota yang dilalui tanpa perlawanan berarti lantaran banyak Tentara Korea Selatan dan warganya yang melarikan diri. Tiga hari kemudian Pasukan Kim berhasil mencapai ibukota Seoul dan menguasainya. Setelah menguasai ibukota Pasukan Utara berupaya menarik simpati dari rakyat agar mendukung misi reunifikasi tersebut. Hal ini penting lantaran dukungan dari rakyat Selatan dapat menjadi dalih membenaran dilakukannya invasi melawan rezim Rhee dan pendudukan AS. Namun, ternyata upaya untuk meraih simpati rakyat Selatan tidak berhasil lantaran mereka enggan berada di bawah kekuasaan komunis (Sandler, 1999:48-49).

Setelah berhasil menguasai Seoul Pasukan Korea Utara tidak mengendurkan peperangan. Invasi kemudian dilanjutkan menuju selatan ibukota hingga ke Busan. Dalam perjalanan untuk menguasai seluruh daratan semenanjung tersebut Pasukan Kim harus berhadapan dengan tentara AS yang ditugaskan di Korea Selatan. Namun, karena pasukan AS tersebut minim persenjataan dan pengalaman maka dengan mudah dikalahkan oleh Pasukan Utara yang bersenjata lengkap (Bong Lee, 2003:83-85). Akan tetapi, keunggulan Tentara Korea Utara ternyata ada batasnya setelah hampir 3 bulan bertempur tanpa hambatan mereka mulai mengalami kebuntuan lantaran gagal menaklukkan Busan yang dipertahankan mati-matian oleh Pasukan AS dan Korea Selatan. Selain itu, tentara Korea Utara juga mengalami kekurangan logistik dan persenjataan yang mulai rusak. Kegagalan menaklukkan Busan ternyata menjadi titik balik bagi kekalahan pihak Utara setelah Amerika Serikat mengerahkan pasukannya di bawah bendera PBB dan mendarat di Incheon (Wicaksono, 2020:146-147).

Pada awal terjadinya perang, Pasukan AS yang dikirim dari markas utama di Okinawa Jepang bukanlah pasukan utama, tetapi hanyalah tentara cadangan dengan kekuatan seadanya. Alhasil pasukan AS tersebut dengan mudah di kalahkan oleh Pasukan Korea Utara yang bersenjata lengkap. Ketika Tentara Korea Utara sedang berusaha menaklukkan Kota Busan yang menjadi pertahanan terakhir pihak Selatan, Amerika Serikat bersama PBB telah merencanakan pendaratan besar-besaran di Incheon yang posisinya ada di dekat ibukota Seoul. Pendaratan ini tentunya untuk mematahkan perlawanan pihak komunis dan membebaskan Selatan (Wicaksono, 2020:147).

Pada 15 September 1950 pasukan AS yang menggunakan bendera PBB mendarat di Incheon. Dalam pendaratan tersebut pasukan AS dipimpin langsung oleh Jenderal MacArthur. Pasca berhasil mendarat, pasukan AS segera bergerak ke arah timur menuju ibukota Seoul. Setelah bertempur selama berhari-hari melawan tentara Korea Utara, pasukan AS pimpinan Arthur berhasil menguasai ibukota tersebut. Pasca direbutnya Seoul dari tangan komunis, Syngman Rhee kembali menegakkan pemerintahannya dan mulai mengatur kota (Seth, 2011: 325-326).

Keberhasilan dalam membebaskan Seoul oleh pasukan AS membuat tentara Kim mundur ke perbatasan di Utara, sehingga memutus jalur logistik bagi rekan-rekannya yang masih bertempur di batas Busan. Sementara itu, kemenangan pihak Selatan di ibukota membuat moral pasukan AS di Busan meningkat dan kemudian mendorong mereka untuk menyerang tentara komunis yang masih tersisa. Lantaran ketiadaan bantuan logistik dan posisi yang sudah terisolasi di selatan Seoul, tentara komunis akhirnya tercerai-berai dan memilih mundur ke perbatasan di 38° LU. Mundurnya pasukan Korea Utara ini membuat keberhasilan yang telah dicapai selama 3 bulan menjadi sia-sia (Seth, 2011: 325-326).

Pasca berhasil mengalahkan tentara komunis dan membebaskan Korea Selatan dari invasi Kim Il Sung, pasukan AS ternyata tidak tinggal diam membiarkan invasi Korea Utara tersebut. Amerika berencana untuk menumpas pasukan Kim dan membebaskan Semenanjung Korea dari pengaruh komunisme, serta mewujudkan reunifikasi di bawah Pemerintahan Rhee. Untuk mewujudkan rencana tersebut Amerika mendesak PBB untuk mengeluarkan resolusi yang menjadi dasar bagi penyerangan ke Korea Utara. Resolusi pun akhirnya dikeluarkan dan pasukan AS yang menggunakan bendera PBB kemudian menyeberangi garis perbatasan 38° untuk melakukan penyerangan ke Korea Utara. Setelah menyeberangi perbatasan dan terus bergerak ke wilayah kekuasaan Kim Il Sung, pasukan AS dan Korea Selatan mampu mengalahkan tentara komunis dalam setiap pertempuran. Kekalahan demi kekalahan ini membuat pasukan komunis terus bergerak mundur hingga terpojok di Sungai Yalu yang menjadi batas alam antara Korea dan Cina. (Seth, 2011: 325-326).

Mengetahui kekalahan yang diderita oleh pasukannya, Kim Il Sung segera mengirimkan telegram ke Moskwa untuk meminta bantuan Stalin. Stalin yang

mengetahui Korea Utara sedang berada di ujung tanduk segera meminta Mao Zedong mengirimkan tentaranya ke Korea untuk memukul mundur pasukan AS kembali ke selatan perbatasan. Mao dengan segera mengirimkan pasukannya yang membuat Cina secara resmi ikut terlibat dalam Perang Korea. Keterlibatan tentara Mao ini ternyata mampu membalikkan keadaan. Korea Utara yang sudah terjepit berhasil memukul mundur pasukan AS kembali ke Korea Selatan pada akhir tahun 1950 (Yufan dan Zihai, 1990:102).

Setelah Korea Utara berhasil dibebaskan dari pasukan AS, Kim Il Sung yang mengungsi dapat kembali menegakkan pemerintahannya di Pyongyang. Namun pasca pembebasan itu gerak pasukan kedua Korea tidak mengalami kemajuan. Peperangan selama tiga tahun berikutnya hanya terjadi di sekitar perbatasan 38° LU. Kedua belah pihak tidak ada yang benar-benar mampu untuk menyerang dan menginvasi melewati garis batas (Bong Lee, 2003:201-205). Setelah jenuh berperang kedua belah pihak atas desakan Amerika Serikat dan Soviet bersedia menghentikan perang dengan perjanjian gencatan senjata tanpa batas waktu pada 25 Juni 1953 (Wicaksono, 2020:268). Sebuah perjanjian yang membuat kedua Korea masih bermusuhan hingga kini lantaran belum tercapainya resolusi perdamaian.

3. Diplomasi Indonesia dalam Menciptakan Perdamaian di Semenanjung Korea

Ketika pertempuran di Korea sedang berkecamuk, dunia internasional pada dasarnya turut bereaksi terhadap perang tersebut. Saat Korea Utara sedang menuai kemenangan di Selatan pada tiga bulan pertama invasi organisasi PBB segera bersidang. Di sisi lain Amerika dengan segera memutuskan untuk mengirimkan bantuan untuk mempertahankan Korea Selatan. Namun, lantaran khawatir bersinggungan langsung dengan Soviet, AS kemudian memanfaatkan resolusi PBB untuk memuluskan kepentingannya di Korea (Stairs, 1970:302-303).

Lantas bagaimana dengan sikap Indonesia?. Sejak perang dimulai Indonesia telah mengambil sikap netral dengan tidak memihak salah satu kubu yang bertikai. Walaupun bersikap netral, tetapi Indonesia tidak lantas berdiam diri tanpa berupaya untuk menciptakan perdamaian di kawasan tersebut. Apalagi sejak awal kemerdekaan Indonesia telah menegaskan untuk memilih prinsip kebijakan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Bebas artinya tidak memihak salah satu kubu baik Blok Barat maupun Blok Timur,

termasuk dalam Perang Korea yang sangat jelas menjadi manifestasi nyata persaingan era Perang Dingin. Sementara prinsip aktif, Indonesia akan terlibat dalam upaya menciptakan dan menjaga perdamaian dunia seperti yang telah tercantum dalam konstitusi saat terbentuknya negara (Hatta, 1953:5).

Sejak terjadinya Perang Korea di bulan Juni 1950 Pemerintah Indonesia melihat bahwa perang tersebut merupakan bagian dari konflik internal suatu negara. Oleh karena itu, Indonesia tidak akan terlibat langsung dalam perang tersebut. Apalagi terlibat untuk mendukung salah satu kubu yang sedang saling bertikai. Namun demikian, Indonesia sedari awal telah menyerukan untuk menghentikan pertikaian dan pentingnya menempuh jalan damai untuk mencari solusi yang terbaik (Leifer, 2019:42).

Ketika Perang Korea baru berlangsung di bulan Juni, Indonesia saat itu belum menjadi bagian dari organisasi PBB. Oleh karenanya, Indonesia belum dapat terlibat aktif dalam forum tersebut untuk membahas permasalahan konflik di Korea. Di satu sisi saat terjadinya perang tersebut Indonesia masih disibukkan dengan permasalahan dalam negeri. Hal ini dikarenakan kondisi Indonesia yang belum lama merdeka dan meraih kedaulatan. Kondisi kekacauan selama masa revolusi menuntut Pemerintah Indonesia untuk fokus pada permasalahan di dalam negeri. Seperti penguatan sistem pemerintahan dan perbaikan ekonomi (Kroef, 1952:283).

Walaupun sedang disibukkan dengan permasalahan internal pasca revolusi Indonesia tetap berkomitmen pada upaya menciptakan kehidupan dunia yang damai sesuai kebijakan politik luar negeri yang telah ditetapkan. Di samping itu sebagai negara yang baru merdeka Indonesia juga merasa perlu meningkatkan keterlibatannya dalam pemecahan permasalahan internasional.

Sebulan pasca Kim Il Sung melancarkan serangan ke Korea Selatan, Indonesia yang belum menjadi anggota PBB lantaran masih dalam proses pengajuan memutuskan untuk tidak mengikuti arahan dari Dewan Keamanan PBB. Dewan Keamanan PBB atas desakan Amerika dan sekutunya telah mengeluarkan resolusi untuk memberikan bantuan kepada Korea Selatan dengan pengiriman pasukan untuk mengusir tentara Korea Utara. Indonesia saat itu mengabaikan resolusi tersebut dengan melarang bersandar, bongkar muat, mengisi bahan bakar bagi setiap kapal perang asing yang terlibat dalam operasi

PBB di pelabuhan. Pemerintah Indonesia juga menerbitkan aturan bagi kapal perang yang ingin bersandar di Pelabuhan harus mengantongi izin dari Indonesia (Mason, 2015:52).

Sikap awal yang ingin ditunjukkan oleh Indonesia sebelum nantinya terlibat langsung di PBB dalam permasalahan Perang Korea ini dimaksudkan agar Indonesia tidak terlihat mendukung salah satu pihak dalam pertempuran tersebut. Bila Indonesia mengizinkan kapal perang bersandar di pelabuhannya akan dapat ditafsirkan sebagai dukungan kepada Blok Barat dan dianggap musuh bagi Blok Timur (Mason, 2015:52). Sementara itu, Indonesia sedari awal telah menegaskan posisinya. Indonesia tidak ingin terlibat dalam pusaran konflik Perang Dingin.

Selain Pemerintah Indonesia yang sedari awal menegaskan tidak ingin terlibat dalam pertikaian di Korea. Masyarakat Indonesia juga memiliki sikap yang sama. Sikap rakyat Indonesia ini salah satunya ditunjukkan pada acara yang diinisiasi oleh Komite Perdamaian Dunia di Medan pada 6 Agustus 1950. Dalam acara yang dihadiri oleh 15000 orang dari berbagai latar belakang tersebut menghasilkan resolusi perdamaian yang ditujukan pada Presiden Soekarno (ANRI, 1950).

Dalam resolusi tersebut berisi beberapa poin yang intinya meminta Pemerintah Indonesia untuk tidak terlibat dalam pusaran konflik tersebut. Meminta Pemerintah Indonesia untuk turut serta mengupayakan perdamaian di Korea. Selain itu, mendesak Pemerintah Indonesia untuk menekan Amerika agar menarik pasukannya dari Semenanjung Korea demi terciptanya perdamaian (ANRI, 1950).

Selain memberikan resolusi perdamaian Komite tersebut juga mendesak Pemerintah Indonesia untuk menolak ajakan dari Amerika Serikat untuk bergabung dalam perang. Pemerintah Indonesia diminta untuk tidak memihak dan memiliki kecondongan terhadap Blok Barat (ANRI, 1950). Walaupun pada saat itu Indonesia sedang berupaya menjalin kerja sama ekonomi dengan Amerika untuk perbaikan kondisi di dalam negeri yang hancur saat revolusi. Di sisi lain komite ini juga ingin menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia berkomitmen pada usaha menjaga perdamaian bukan justru terlibat dalam arus konflik dari pihak tertentu.

Keterlibatan aktif Indonesia dalam permasalahan Perang Korea melalui diplomasi multilateral mulai ditunjukkan saat telah diterima menjadi anggota PBB pada 28 September 1950. Walaupun kedudukan dan posisi Indonesia di organisasi internasional

tersebut relatif masih lemah lantaran baru merdeka. Akan tetapi, tidak menyurutkan semangat para diplomat Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah dunia termasuk Perang Korea.

Indonesia melalui perwakilannya di PBB yang dipimpin oleh Duta Besar L.N. Palar mulai menjalankan diplomasinya saat pembahasan Perang Korea masuk dalam agenda sidang Majelis Umum. Akan tetapi, dalam pertemuan yang diadakan tanggal 30 September 1950 Palar menyatakan posisi Indonesia untuk abstain lantaran belum mendapatkan arahan dari Pemerintah Pusat. Dalam pertemuan tersebut Palar cenderung memilih bersikap hati-hati dengan tidak menolak atau mendukung draf resolusi yang diajukan oleh Amerika (UN Archives. 1950).

Beberapa hari kemudian di sela-sela sidang, Majelis Umum mengesahkan sebuah resolusi yang memberikan mandat kepada PBB untuk membentuk komisi khusus untuk penanganan masalah di Korea. Komisi ini kemudian diberi nama *United Nations Commission for the Unification and Rehabilitation of Korea*. Komisi ini bertugas untuk melakukan investigasi selama perang dan berusaha untuk dapat membentuk pemerintahan bersatu di Semenanjung Korea. Namun, komisi independen ini tidak dapat menjalankan perannya lantaran perang yang berkecamuk dan kedua negara yang sulit untuk disatukan kembali. Pada awal terbentuknya komisi PBB Indonesia masih bersikap hati-hati dengan bersikap abstain dalam pemungutan suara pada 7 Oktober 1950 (UN Archives. 1950).

Sementara itu perwakilan Indonesia di PBB kembali ikut terlibat dalam pembahasan Perang Korea ketika Pasukan Republik Rakyat Cina turut terlibat dalam perang tersebut. Hadirnya Cina dalam perang di Semenanjung Korea bertujuan untuk membantu pasukan Kim Il Sung yang mulai terdesak (Chen, 1992:12). Akan tetapi, situasi perang menjadi semakin kacau. Indonesia selaku negara netral dalam perang tersebut kemudian mengirimkan petisi agar Cina kembali menarik pasukannya di Korea dan tidak terlibat lebih jauh. Namun, petisi tersebut mendapatkan penolakan. Palar selaku perwakilan Indonesia di PBB pada 12 Desember 1950 turut terlibat dalam pertemuan yang membahas keterlibatan Cina dalam Perang Korea.

Dalam sidang yang diadakan oleh Majelis Umum Palar selaku perwakilan Indonesia bersama dengan delegasi Mesir, Iran, Irak, Yaman, Arab Saudi, Afghanistan,

Pakistan, Burma, Lebanon, Suriah, India, dan Filipina mengecam tindakan Cina yang justru memperkeruh situasi perang. Ketiga belas negara ini kemudian mengajukan draf resolusi yang diberi nama “Peking Government” yang isinya sebagai berikut:

The General Assembly,
Viewing with grave concern the situation in the Far East,
Anxious that immediate steps should be taken to prevent the conflict in Korea spreading to other areas and to put an end to the fighting in Korea itself and that further steps should then be taken for a peaceful settlement of existing issues in accordance with the purposes and principles of the United Nations,
Request to the President of the General Assembly to constitute a group of three persons including himself to determine the basis on which a satisfactory cease- fire in Korea can be arranged and to make recommendations to the General Assembly as soon as possible (UN Archives. 1950).

Dalam draf resolusi yang diajukan oleh Delegasi Indonesia bersama beberapa negara Arab dan Asia ini mengecam intervensi Cina dalam Perang Korea. Selain itu, resolusi ini sejatinya merupakan sebuah proposal untuk mengadakan gencatan senjata yang ditujukan kepada Cina dalam perang tersebut. Akan tetapi, resolusi ini kemudian mendapatkan penolakan dari Delegasi Cina. Melihat penolakan dari Cina ini Palar selaku perwakilan Indonesia merasa prihatin dengan sikap tersebut (UN Archives. 1950).

Walaupun mendapatkan penolakan, semangat Palar untuk memperjuangkan perdamaian di Korea tidak pernah surut. Dalam sidang selanjutnya Delegasi Indonesia dan beberapa negara Asia kembali mengusulkan draf resolusi yang menyerukan kepada Soviet dan Amerika untuk memulai perundingan dalam rangka mencari solusi damai dari Perang Korea. Akan tetapi, usulan delegasi Indonesia dan negara Asia kembali mengalami kebuntuan.

Memasuki tahun 1951 Perang Korea masih terus berlanjut. Cina masih terus mempertahankan pasukannya di Korea. Bahkan Cina terus memberikan bantuan kepada rezim Kim Il Sung dalam perang tersebut. Alhasil keterlibatan Cina ini semakin membuat upaya damai yang sedang diperjuangkan melalui PBB semakin menuai kebuntuan. Di samping itu PBB justru terlibat dalam pengerahan pasukan bersama Amerika (UN Archives. 1951).

Saat keterlibatan Cina semakin menguat dalam perang di Korea, sidang Majelis Umum kembali dilaksanakan untuk membahas persoalan tersebut. Terutama untuk menentukan sikap terhadap intervensi Cina. Indonesia yang diwakili oleh Palar pada

pertemuan tanggal 25 Januari 1951 kembali mengusulkan draf resolusi. Resolusi ini diajukan bersama dengan delegasi Afghanistan, Burma, Mesir, India, Irak, Iran, Suriah, Pakistan, Arab Saudi, Yaman, dan Lebanon. Adapun isi dari draf resolusi tersebut ialah:

The General Assembly,

Viewing with grave concern the situation in the Far East, considering that the continuance of this situation is likely to endanger the maintenance of world peace and security,

Noting the reply of the Central People's Government of the People's Republic of China to the resolution of the First Committee dated 13 January 1951,

Desiring to continue its efforts to secure a cessation of hostilities in Korea and a peaceful settlement of the Korean and other Far Eastern problems in accordance with the principles and purposes of the United Nations,

Recommends that representatives of the Governments of France, the United Kingdom, the United States of America, the Union of Soviet Socialist Republics, Egypt and India and of the Central People's Government of the People's Republic of China meet as soon as possible for the purpose of securing all necessary elucidations and amplifications of the above-mentioned reply and of making any incidental or consequential arrangements towards a peaceful settlement of the Korean and other Far Eastern problems,

The first meeting of the above representatives will be held on a date and at a place to be fixed by the President of the General Assembly; the date and place of each subsequent meeting will be fixed by the representatives themselves. They will hold their meetings in private and will frame their own rules of procedure. They will advise the General Assembly of the result of their consultations as early as possible (UN Archives. 1951).

Draf resolusi yang diajukan oleh Delegasi Indonesia dan negara Asia tersebut sejatinya merupakan sebuah upaya diplomasi untuk segera mengadakan perundingan diantara negara yang terlibat. Namun, resolusi ini juga mengalami kebuntuan lantaran kurangnya dukungan mayoritas dari negara-negara anggota PBB (UN Archives. 1951).

Dalam sidang lanjutan Delegasi Amerika mengajukan resolusi yang berisi kecaman keras terhadap Cina dan menyebut negara tersebut sebagai penyerang dari luar. Mengetahui isi draf resolusi yang diajukan oleh Amerika, Palar yang mewakili Indonesia menolak gagasan tersebut. Penolakan Indonesia terhadap isi resolusi Amerika lantaran terlalu berpihak ke Blok Barat. Apabila Palar mendukung resolusi tersebut maka secara tidak langsung membawa Indonesia untuk berdiri di sisi Blok Barat. Padahal sejak awal Indonesia memilih posisi netral sembari aktif mengupayakan penyelesaian secara damai.

Dalam penolakannya terhadap resolusi Amerika Palar menyampaikan bahwa menyalahkan Cina dalam situasi ini hanya akan menyulitkan posisi Komite Pertama untuk menegakkan perdamaian. Komite Pertama harus meyakinkan Republik Rakyat Cina agar mau mengubah pandangannya dan berfokus pada upaya menegakkan perdamaian. Walaupun delegasi Indonesia menolak resolusi Amerika, pada akhirnya resolusi tersebut tetap disahkan oleh Majelis Umum lantaran mendapatkan dukungan mayoritas. Resolusi ini kemudian dikenal sebagai “Resolusi Banding” (UN Archives. 1951).

Walaupun Indonesia menolak isi resolusi yang diajukan oleh Amerika dalam sidang 1 Februari 1951. Delegasi Indonesia tidak secara terang-terangan menolak dengan memberikan suara saat voting. Akan tetapi, Indonesia memilih untuk abstain (UN Archives. 1951). Hal ini merupakan jalan tengah bagi Indonesia agar tetap netral dalam menyikap persoalan tersebut. Apabila Indonesia menyetujui isi resolusi maka secara tidak langsung mendukung Blok Barat. Akan tetapi, apabila Indonesia menolak maka dapat dianggap sebagai pendukung Blok Timur dan dikhawatirkan akan menyinggung Amerika. Bila Amerika keberatan dengan sikap Indonesia yang terlalu keras maka dapat berdampak pada hubungan kerja sama kedua negara. Oleh karenanya, sikap yang paling aman bagi Indonesia adalah abstain saat pemungutan suara.

Sementara Perang Korea masih terus berlanjut, pihak Blok Barat yang diwakili oleh Amerika dan sekutunya di NATO mengajukan draf resolusi baru. Draft resolusi baru ini berkaitan dengan respons terhadap tindakan Soviet yang menyerang pasukan PBB dalam perang. Menyikapi resolusi tersebut diplomat Indonesia Palar menolak untuk mendukungnya. Hal ini disebabkan resolusi tersebut dikhawatirkan tidak akan membawa perdamaian lantaran diajukan sepihak oleh Blok Barat untuk mengecam tindakan Soviet. Menurut Palar Indonesia akan memberikan persetujuan selama resolusi yang diajukan merupakan sikap bersama kedua kubu dan mengarah pada resolusi perdamaian (IV LD, 1964:159). Akan tetapi, sikap Indonesia ini mendapat penolakan dari sidang Majelis.

Meskipun demikian Indonesia melalui diplomatnya tetap berada dalam posisi netral sesuai dengan kebijakan politik luar negeri. Sikap Indonesia untuk terus netral dan tidak memihak ini juga ditunjukkan saat PBB mengeluarkan resolusi yang meminta negara anggota untuk membantu pasukan PBB di Perang Korea yakni dengan

mengirimkan pasukan. Dalam sidang yang diadakan pada 5 November 1951 Palar menolak keinginan PBB dengan dalih bahwa militer lebih dibutuhkan untuk menjaga keamanan dalam negeri yang belum stabil pasca revolusi (IV LD, 1964:160).

Ketika Perang Korea masih terus berlangsung walaupun mengalami stagnasi di wilayah perbatasan. Usaha untuk mendamaikan kedua kubu yang saling bertikai terus berjalan. Indonesia sendiri sedari awal terus mendukung upaya damai di Semenanjung Korea. Pada saat Jacob Malik yang merupakan perwakilan Soviet mengajukan resolusi gencatan senjata untuk mengakhiri perang Indonesia mendukung proposal tersebut. Delegasi Indonesia melihat proposal tersebut merupakan jalan efektif untuk meredakan ketegangan lantaran memberikan kebebasan baik Korea Selatan maupun Korea Utara untuk memiliki pemerintahan sendiri yang bebas dari pengaruh Blok Barat dan Blok Timur. Walaupun proposal ini di luar keinginan akan adanya reunifikasi dari kedua negara, tetapi penghentian perang merupakan sebuah solusi damai (Yulia, 2019:17). Akhirnya setelah berperang selama tiga tahun, kedua Korea sepakat untuk menghentikan perang dalam sebuah perjanjian gencatan senjata pada 25 Juni 1953.

Berakhirnya Perang Korea yang telah berlangsung selama tiga tahun dengan gencatan senjata diharapkan menjadi awal terciptanya perdamaian di wilayah tersebut. Walaupun pada kenyataannya ketegangan antara dua negara satu bangsa tersebut masih sering terjadi pasca perang. Hal ini karena hingga kini keduanya sejatinya masih berada dalam suasana berperang lantaran perjanjian yang dihasilkan bukanlah perjanjian damai untuk mengakhiri peperangan. Oleh karenanya, berakhirnya peperangan masih menyisakan sederet masalah yang perlu diselesaikan seperti rencana rehabilitasi Korea dan reunifikasi (Wicaksono, 2020:276). Rencana terakhir hingga kini masih menjadi persoalan yang belum terpecahkan.

Pasca berakhirnya perang pembahasan mengenai permasalahan di Korea masih menjadi topik dalam agenda sidang Majelis Umum PBB. Seperti yang terjadi dalam sidang yang berlangsung sejak Agustus 1953 hingga Desember 1953. Permasalahan Korea masih menjadi topik pembahasan. Delegasi Indonesia di PBB juga turut terlibat dalam pembahasan tersebut. Pada sidang di Bulan Agustus, perwakilan Indonesia bersama dengan delegasi dari Liberia, India, Burma mengajukan draf resolusi yang memungkinkan Sekretaris Jenderal PBB menjalin komunikasi dengan pihak lain untuk

mendalami permasalahan di Korea. Namun, karena resolusi yang diajukan dianggap bersifat prosedural maka banyak menuai penolakan (UN Archives. 1953).

Dalam sidang Majelis Umum di tahun berikutnya yakni 1954, delegasi Indonesia kembali terlibat dalam pembahasan “Korean Question” yang berlangsung di komisi 1 Majelis Umum. Keterlibatan Indonesia di dalam membahas persoalan Korea yang belum usai ini merupakan bagian dari peran aktif Indonesia melalui diplomasi untuk menciptakan perdamaian dunia khususnya di Korea yang belum pulih pasca berakhirnya perang. Dalam diskusi di Komisi 1, delegasi Indonesia turut mendesak agar perwakilan Korea Utara dan Cina turut dihadirkan dalam membahas persoalan Korea (UN Archives. 1954). Hal ini amat penting agar upaya perdamaian di wilayah tersebut bisa segera dicapai. Namun, usulan ini selalu mendapatkan penolakan dari Amerika dan sekutunya yang sebelumnya terlibat langsung dalam Perang Korea. Amerika dan sekutunya tidak mengehndaki Korea Utara diberikan kesempatan untuk terlibat dalam pembicaraan (UN Archives. 1954). Penolakan ini tentunya semakin menghambat penyelesaian damai di Korea.

Walaupun demikian dalam sidang tanggal 11 Desember 1954 tersebut dimana Indonesia terlibat di dalamnya. Majelis Umum mengesahkan sebuah resolusi yang isinya meminta agar konflik di Korea dapat diselesaikan secara damai sesuai tujuan PBB. Walaupun dalam konferensi Jenewa, negosiasi antara dua belah pihak belum menghasilkan perjanjian damai. Dalam resolusi tersebut PBB juga menegaskan harapan agar perdamaian tersebut dapat terwujud dengan Korea yang bersatu berdasarkan pemerintahan demokratis dan representatif (UN Archives. 1954). Meskipun resolusi ini tampaknya sangat baik, perwakilan Indonesia dalam pemungutan suara memilih abstain. Hal ini lantaran tidak dilibatkannya Korea Utara dan Cina dalam pembahasan mengenai konflik tersebut di sidang Majelis Umum. Sikap abstain tersebut bukan berarti Indonesia tidak mendukung perdamaian di Korea. Akan tetapi, Indonesia berharap agar dalam setiap pembahasan mengenai konflik tersebut dapat dihadirkan kedua belah pihak yang bertikai, sehingga resolusi yang dihasilkan dapat diterima semua pihak (UN Archives. 1954).

Dalam tahun-tahun berikutnya pembahasan mengenai konflik Korea dalam rangka mencapai perdamaian permanen melalui diplomasi dan negosiasi terus dilakukan termasuk melalui forum PBB. Indonesia melalui diplomatnya juga selalu terlibat dalam

setiap pembicaraan. Di satu sisi Pemerintah Indonesia juga turut mendukung penyelesaian damai di Korea sembari tetap bersikap netral dalam memahami pertikaian tersebut. Indonesia juga berupaya menjalin hubungan baik dengan kedua Korea.

Namun demikian, sepertinya usaha untuk mencapai perdamaian abadi di Korea sangat sulit tercapai. Berbagai usaha diplomasi dan negosiasi antara keduanya selalu mencapai jalan buntu. Berbagai pihak termasuk Indonesia telah berupaya untuk mendamaikan keduanya. Akan tetapi, hingga kini perdamaian abadi di Semenanjung Korea belum tercapai dan rasanya semakin sulit untuk diwujudkan.

Simpulan

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Perang Korea terjadi akibat adanya perbedaan ideologi antara Korea Utara dan Korea Selatan pasca berakhirnya Perang Dunia II. Pasca berakhirnya perang kedua Korea mendapatkan pengaruh dari dua negara *superpower* yang saling bersaing. Perbedaan ideologi dan keinginan reunifikasi dari Korea Utara menyebabkan negara tersebut menginvasi tetangganya. Terjadinya perang ini telah menimbulkan kekhawatiran akan rusaknya perdamaian dunia dan keamanan internasional yang mengarah pada perang baru yang lebih besar antara dua blok yang saling berseberangan. Adanya kekhawatiran tersebut kemudian membuat PBB turun tangan untuk meredakan konflik tersebut melalui diplomasi. Indonesia sebagai negara baru juga turut ambil bagian dalam penyelesaian konflik tersebut dengan melakukan diplomasi multilateral, seperti dengan menyerukan penghentian perang dan mengajukan resolusi perdamaian bersama negara Asia Afrika untuk disahkan oleh Sidang Majelis Umum PBB.

DAFTAR PUSTAKA

- ANRI, Kabinet Presiden Republik Indonesia Serikat, 20 Desember 1949-6 September 1950.
- Chen, Jian. 1992. China's Changing Aims during the Korean War, 1950-1951. dalam *The Journal of American-East Asian Relations*. Vol. 1. No. 1.
- Fautua, David, T. 1997. The "Long Pull" Army: NSC 68, the Korean War, and the Creation of the Cold War U.S. Army. dalam *The Journal of Military History*. Vol. 61. No. 1.
- Kleiner, Jurgen. 2011. *Korea: A Century of Change*. New Jersey: World Scientific Publishing.
- Kroef, Justus M. Van der. 1952. "Indonesia: Independent in the Cold War. dalam

- International Journal*, Vol. 7, No. 4.
- Kuntowijoyo. 2013. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta:Tiara Wacana.
- Lee, Bong. 2003. *The Unfinished War*. New York: Algora Publishing.
- Leifer, Michael. 2019. *Politik Luar Negeri Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Maon, R. 2015. The Korean War and Us-Indonesia Relations 150-1954. dalam *Journal of International Studies*, Vol. 11.
- Michael Wicaksono. 2020. *Perang Korea: Pertikaian Terpanjang Dua Saudara*. Jakarta: Gramedia.
- Mohammad Hatta. 1953. *Dasar Politik Luar Negeri Republik Indonesia*. Jakarta: Tintamas.
- Rizkia Risnayasa Yulia. 2019. Sikap Politik Indonesia Terhadap Perang Korea (1950-1953). dalam *Tugas Akhir*. Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI. Tidak Diterbitkan.
- Sandler, Stanley. 1999. *The Korean War: No Victors, No Vanquished*. London: UCL Press.
- Seth, Micahel J. 2006. *A Concise History of Premodern Korea; From Antiquity through the Nineteenth Century, Volume 1*. Maryland; Rowman & Littlefield.
- , 2011 *A History of Korea: From Antiquity to the Present*. Maryland: Rowman & Littlefield Publishers.
- Stairs, Deni s. 1970. The United Nations and the Politics of the Korean War. Dalam *International Journal*. Vol. 25. No. 2.
- VI. D. 164. *Indonesia's Independence and Active Foreign Policy*. Connecticut: Yale University.
- Wildan Sena Utama. 2017. *Konferensi Asia Afrika:Asal-Usul Intelektual dan Warisannya Bagi Geakan Global Antiimperialisme*.Tangerang Selatan: Marjin Kiri.
- Yasuda, Jun. 1998. A Survey: China and the Korean War. dalam *Social Science Japan Journal*. Vol. 1. No. 1.
- Yufan, Hao and Zihai, Zhai. 1990. China's Decision to Enter the Korean War: History Revisited. dalam *The China Quarterly*, No. 121.

Sumber Internet dan Arsip Digital

- Anonim, "Korean War", *Yorkshire Evening Post*, Monday, 26 June 1950. Diakses melalui <https://www.britishnewspaperarchive.co.uk> pada 11 Juni 2023, pukul 10.00 WIB.
- UN Archives, General Assembly: Official Records Fifth Session, 30 September 1950, No. A/C/1/SR/347. Diakses melalui <https://digitallibrary.un.org/> pada 25 Desember 2022, pukul 13.00 WIB.
- UN Archives, General Assembly: Official Records Fifth Session:, 7 Oktober 1950, Diakses melalui <https://digitallibrary.un.org/> pada 26 Desember 2022, pukul 11.00 WIB.
- UN Archives, General Assembly, Fifth Session, First Committee: Intervention of the Central People's Government of the Republic of China in Korea, No. A/C.1/641. Diakses melalui <https://digitallibrary.un.org/> pada 26 Desember 2022, pukul 10.00 WIB.
- UN Archives, General Assembly, Fifth Session, First Committee, No. A/C.1/642. Diakses melalui <https://digitallibrary.un.org/> pada 26 Desember 2022, pukul 10.00 WIB.
- UN Archives, General Assembly, Fifth Session, First Committee: Intervention of the Central People's Government of the Republic of China in Korea, No. A/C.1/642/REV.1. Diakses melalui <https://digitallibrary.un.org/> pada 2 Januari 2023, pukul 10.00 WIB.

UN Archives, Summary record of the 435th meeting: 1st Committee, No. A/C.1/SR.435. Diakses melalui <https://digitallibrary.un.org/> pada 2 Januari 2023, pukul 13.00 WIB.

UN Archives, General Assembly Official Records of the Plenary Meeting. Diakses melalui <https://digitallibrary.un.org/> pada 2 Januari 2023, pukul 14.00 WIB.

UN Archives, The Korean Question, No. A/2448, A/2476. A/2518, A/2603, A/2626. Diakses melalui <https://digitallibrary.un.org/> pada 2 Januari 2023, pukul 16.00 WIB.

UN Archives, General Assembly, Ninth Session, Plenary Meeting. Diakses melalui <https://digitallibrary.un.org/> pada 5 Januari 2023, pukul 09.00 WIB.

UN Archives, General Assembly, Ninth Session: Official Records, Plenary Meeting, 11 Desember 1954, No. A/PV/510. Diakses melalui <https://digitallibrary.un.org/> pada 5 Januari 2023, pukul 19.00 WIB.

UN Archives, General Assembly: Resolution Adopted, No. A/RES/811/X. Diakses melalui <https://digitallibrary.un.org/> pada 5 Januari 2023, pukul 21.00 WIB.